



Research Article

Characteristics of Islam and Political Power in The Sumatran Kingdoms (Karakteristik Islam dan Kekuasaan Politik di Kerajaan Sumatera)

Ahmad Syaikhu, Rifqi²

1. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia; ahmadsyaikhu@gmail.com
2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; rifqi@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 27, 2024

Revised : April 25, 2024

Accepted : May 20, 2024

Available online : Januari 23, 2025

How to Cite: Ahmad Syaikhu, & Rifqi. (2025). Characteristics of Islam and Political Power in The Sumatran Kingdoms (Karakteristik Islam dan Kekuasaan Politik di Kerajaan Sumatera). *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 1(1), 1-17. Retrieved from <https://lenterademokrasi.hadana.id/index.php/i/article/view/1>

Abstract. Islam in the Nusantara has a close connection with its history of arrival and spread, including its role in the political sphere during the era of the sultanates, particularly in the Sumatra region. This paper discusses the characteristics of Islam and its influence in shaping political power during that period. The study begins by tracing the early history of Islam's arrival in the Nusantara, which remains a topic of debate among historians. Initially, Islam appeared as small communities in coastal areas, driven by trade, maritime activities, and the spread of Islamic teachings (dakwah). These communities

later developed into centers of political power, such as the Sultanate of Aceh, with significant influence on intellectualism and the international dissemination of Islam.

The formation of Islamic communities in the Nusantara, particularly in coastal areas, marked the early stages of Islam's development in the region. According to Taufik Abdullah et al. in **Sejarah Umat Islam Indonesia** (**The History of Islam in Indonesia**), between the 1st and 5th century Hijri (7th to 13th century CE), Muslim traders and preachers played an essential role in introducing Islam through communities amidst the maritime hegemony of Sriwijaya and the Hindu-Buddhist cultural setting. These communities eventually evolved into Islamic centers of power, such as Aceh in Sumatra; Demak, Pajang, and Mataram in Java; Gowa-Tallo and Bone in Sulawesi; and Ternate and Tidore in Maluku.

The spread of Islam in the Nusantara is inseparable from the political dynamics, power structures, and political traditions of each kingdom. Besides religious motivations, political and economic interests also influenced the patterns of Islam's dissemination and the formation of Islamic societies. In the political realm, Islam was initially used to strengthen the position of Islamic kingdoms in facing threats from non-Islamic powers, such as the Portuguese and the Dutch East India Company (VOC), which sought to monopolize maritime trade. Thus, Islam not only became a religious identity but also an essential tool in building political and economic power in the Nusantara.

Keywords: Islam in Indonesia, The Sultanate of Aceh, Political.

Abstrak.

Islam di Nusantara memiliki hubungan yang erat dengan sejarah masuk dan penyebarannya, termasuk perannya dalam kancah politik pada masa kesultanan, khususnya di wilayah Sumatera. Makalah ini membahas karakteristik Islam dan pengaruhnya dalam membentuk kekuasaan politik pada masa tersebut. Penelitian dimulai dengan penelusuran sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara, yang masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Islam awalnya hadir sebagai komunitas kecil di daerah pesisir, didorong oleh aktivitas perdagangan, pelayaran, dan penyebaran melalui dakwah. Komunitas-komunitas ini berkembang menjadi pusat kekuasaan politik, seperti Kesultanan Aceh, dengan pengaruh signifikan dalam intelektualisme dan penyebaran Islam secara internasional.

Pembentukan komunitas Islam di Nusantara, khususnya di daerah pesisir, merupakan tahap awal perkembangan Islam di wilayah ini. Menurut Taufik Abdullah dkk. dalam **Sejarah Umat Islam Indonesia**, pada abad ke-1 hingga ke-5 H (abad ke-7 hingga ke-13 M), pedagang dan mubalig Islam berperan penting dalam memperkenalkan Islam melalui komunitas-komunitas di tengah hegemoni maritim Sriwijaya dan masyarakat Hindu-Buddha. Komunitas-komunitas ini kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan Islam, seperti Aceh di Sumatera; Demak, Pajang, dan Mataram di Jawa; Gowa-Tallo dan Bone di Sulawesi; serta Ternate dan Tidore di Maluku.

Penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dinamika politik, struktur kekuasaan, dan tradisi politik masing-masing kerajaan. Selain panggilan agama, kepentingan politik dan ekonomi turut memengaruhi corak penyebaran Islam dan pembentukan masyarakat Islam. Dalam bidang politik, Islam awalnya digunakan untuk memperkuat posisi kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi ancaman dari kekuatan non-Islam, seperti Portugis dan Kompeni Belanda, yang mencoba memonopoli pelayaran dan perdagangan. Dengan demikian, agama Islam tidak hanya menjadi identitas keagamaan, tetapi juga alat penting dalam membangun kekuatan politik dan ekonomi di Nusantara.

Kata Kunci : Islam di Indonesia, Kesultanan Aceh, Politik.

PENDAHULUAN

Di Berbicara Islam di Nusantara tidak terlepas dari sejarah masuk dan penyebarannya di Nusantara, serta bagaimana cara bernalar di dalam kancah perpolitikan. Dalam makalah ini, penulis mencoba menemukan bagaimana sesungguhnya perilaku atau pengaruh Islam itu sendiri dan bagaimana cara berkuasanya di dunia politik Nusantara pada masa kesultanan di wilayah Sumatera. Tentunya kritik dan perbaikan dalam makalah ini sangat diperlukan.

Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana Islam dan kekuasaan politiknya pada masa kesultanan di wilayah Sumatera. Sekilas penulis berbicara mengenai sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara masih menjadi sebuah diskursus dan perdebatan di kalangan sejarawan. Begitu pula dengan persoalan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari berbagai rekonstruksi sejarah perdagangan dan pelayaran di Nusantara, diperkirakan bahwa pengaruh Islam telah hadir di kepulauan Nusantara sejak abad pertama Hijriyah sampai ke-4 Hijriyah (7-10 M). Namun besar kemungkinan, bahwa pada masa awal itu Islam hanyalah merupakan agama yang dianut oleh para Muslim yang singgah di perairan dan bandar-bandar penting. Meskipun tidak ada bukti yang shahih, tetapi bukan tidak mungkin kalau dalam periode ini telah mulai terbentuk komunitas-komunitas Islam khususnya di daerah pesisir. Jadi, sebelum Islam memegang hegemoni politik di wilayah Sumatera, mulanya Islam hanya sebatas komunitas-komunitas di daerah pesisir yang ramai dengan pelayaran dan perdagangan.

Mengenai dorongan terbentuknya komunitas Islam ini, Taufik Abdullah menjelaskan bahwa Sekitar Abad ke 1-5 H atau ke 7-13 M dorongan pengambil alihan kekuasaan politik Islam di Nusantara dimulai dari para pedagang dan mubaligh Islam yang memperkenalkan Islam melalui pembentukan komunitas-komunitas Islam di tengah hegemoni Maritim Sriwijaya serta dalam situasi kultural masyarakat Hindu-Budha. Taufik menambahkan, Kemungkinan teori penyebaran Islam melalui perkawinan antara para pedagang dan atau mubaligh Muslim dengan anak negeri, Jalan dagang dan pelayaran yang jauh dan berbahaya dengan teknologi yang sederhana, ditambah lagi pasang surutnya situasi perubahan politik yang menyebabkan kemerosotan dalam perdagangan dan perniagaan telah mendorong terbentuknya komunitas Islam.

Dari komunitas-komunitas Islam inilah yang kemudian ada proses Islamisasi dan selanjutnya menjadi pusat kekuasaan politik bahkan Internasional. Proses Islamisasi itu sendiri kemudian menjadi karakteristik dari Islam dan kekuasaan politiknya di wilayah masing-masing. Hal ini sebagaimana uraian dari Ishom Yusqi yang menjelaskan bahwa Islam pada mulanya mendapatkan kubu-kubu terkuatnya di kota-kota pelabuhan yang sekaligus menjadi ibukota kerajaan, seperti Samudra Pasai, Malaka, dan kota-kota pelabuhan pesisir Jawa, yang pada dasarnya Islam adalah urban (Perkotaan). Proses Islamisasi Nusantara berawal dari kota-kota itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut Ishom Yusqi, Islam adalah fenomena Istana. Istana kerajaan menjadi pusat pengembangan intelektual Islam atas perlindungan resmi penguasa yang disusul kemunculan tokoh-tokoh ulama semacam Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani, Nurrudin al-Raniri, Abdul Rouf Singkel di kerajaan Aceh dan wali songo di kerajaan Demak. Tokoh-tokoh ini mempunyai jaringan keilmuan yang luas baik dalam maupun di luar negeri, sehingga menjadikan Islam Nusantara bersifat internasional. Kota pelabuhan yang juga menjadi istana kerajaan yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam didatangi murid-murid yang nantinya akan menjadi dai-dai yang menyebarkan Islam lebih lanjut ke daerah-daerah lain. Kota pelabuhan juga menjadi pusat penggembelangan kader-kader politik yang kelak akan menjadi raja-raja Islam pertama kerajaan-kerajaan baru.

Dengan berdirinya pusat-pusat kekuasaan Islam seperti Aceh di Sumatera; Demak, Pajang, dan Mataram di Jawa; Gowa-Tallo dan Bone di Sulawesi; Ternatae dan Tidore di Maluku, dan sebagainya, maka penyebaran Islam memang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan politik, struktur politik dan tradisi politik masing-masing pusat kekuasaan atau kerajaan itu. Kepentingan politik atau ekonomi, di samping panggilan suci agama, telah tampil sebagai faktor-faktor yang ikut menentukan corak dan penyebaran, pengembangan agama Islam serta bentukan masyarakat Islam di wilayah masing-masing.

Islam baru masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad menyebabkan Muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berdasarkan sumber berita Cina sejak awal abad Masehi (fase peralihan dari zaman prasejarah akhir di wilayah Nusantara) telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Karena kekayaan hasil buminya wilayah barat Nusantara dan sekitar Maluku telah sejak akhir zaman pra abad Masehi merupakan wilayah yang menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Dari sumber-sumber India Kuno diketahui pula bahwa semenjak sekitar permulaan abad Masehi hingga abad ke-7 Masehi telah tumbuh beberapa pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa. Berdasarkan berbagai cerita-cerita perjalanan Cina dapat diperkirakan bahwa sejak tahun 674 M telah ada koloni-koloni Arab di bagian pulau Sumatera. Berita awal abad ke-16 M dari Tome Pires dalam *Suma Oriental* (1512-1515) mengatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan Pesisir Barat Sumatera, telah banyak kerajaan Islam baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut, antara lain Aceh, Bikan, Lambri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Rupert, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Panchur, Barus, dan lainnya.

Karakteristik menurut KBBI adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Sedangkan, kekuasaan di dalam ilmu politik dimasukkan ke dalam salah satu konsep politik bahkan seringkali politik itu identikkan dengan kekuasaan. Perumusan yang umumnya dikenal ialah bahwa kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Sedangkan cakupan kekuasaan (*scope of power*) menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. Istilah wilayah kekuasaan (*domain of power*) menjawab pertanyaan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa. Dalam suatu hubungan kekuasaan (*power relationship*) selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, selalu ada hubungan tidak seimbang atau asimetris. Ketidakeimbangan ini sering menimbulkan ketergantungan (*dependency*); dan lebih timpang hubungan ini, lebih besar pula sifat ketergantungannya. Hal inilah dalam kekuasaan disebut sebagai dominasi, hegemoni, atau penundukan.

Dari uraian definisi tersebut, bila dikaitkan dengan kekuasaan politik di Kesultanan Sumatera setidaknya diharapkan dalam makalah ini –walaupun sekilas-

kita akan mendapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya sifat khas perilaku Islam pada saat itu, relasi dan wilayah mana saja dalam hegemoninya, dan sumber apa saja yang dipakai dalam kekuasaan politiknya.

PEMBAHASAN

Kerajaan Ta Shi

Dalam beberapa buku sejarah yang mengulas kerajaan-kerajaan pertama di Nusantara adalah kerajaan Samudra Pasai. Sementara menurut Wan Husein Azmi, jauh sebelum berdirinya kerajaan Samudra Pasai, terdapat dua kerajaan Islam yang telah berdiri di Sumatra. Kerajaan Ta Shi dan Kerajaan Perlak.

Sebagaimana dijelaskan di atas. Wan Husein Azmi dengan menggunakan data-data sejarah yang berupa catatan China dan sumber sejarah lainnya mengatakan bahwa Ta Shi adalah kerajaan tertua dan pertama di Nusantara.

Menurut berita tua dari China, terdapat kerajaan tua di bagian Utara Sumatra bernama Ta Shi yang telah mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan China dimana hubungan kerjasama dua kerajaan ini berlangsung sampai tahun 655 M. Konon, nama Ta Shi menurut istilah China di abad ini diberi kepada orang-orang Islam. Dan nama ini ada dalam peta Ptolemaeus. Sementara tempat kerajaan ini letak geografisnya telah dicatat dalam buku-buku tahunan Sung di tahun 922 M. Di mana dalam buku tersebut tercatat letaknya kerajaan Ta Shi adalah lima hari berlayar dari Chop'o (yaitu bagian yang lebih lebar dari Malaka) di seberang selat Malaka. gambaran geografis ini menunjukkan bahwa kerajaan Ta Shi yang dimaksud adalah kerajaan Ta Shi di Sumatra. Bukan di Arab. Sebab perjalanan lima hari sebagai ditulis di atas tidak mungkin dapat dicapai bila yang dimaksud adalah Ta Shi di Arab.

Kerajaan Islam Ta Shi ini pada perkembangan selanjutnya dengan kerajaan Islam Perlak dengan memakai nama kerajaan Ta Jihan (Wan Husein Asmi, PT Almaarif, 1989).

Kerajaan Perlak

Di daerah Aceh bagian Timur, hingga sekarang masih banyak ditemukan pohon kayu besar yang diberi nama "kayu peureulak" (kayu perlak). Dan sebagaimana telah diketahui bahwa Aceh pada masa awal-awal Islam telah menjadi pusat perniagaan dan menjadi titik perjumpaan pedagang-pedagang asing yang salah satu komoditinya adalah kayu perlak. Pada titik ini, nama perlak menjadi semacam "brand" bahkan sampai menjadi sebutan khusus pada daerah tersebut. Para pelancong dan pedagang yang datang ke tempat ini menamakan Bandar pelabuhan ini dengan sebutan Bandar Perlak.

Perlak sebagai sebuah pelabuhan perniagaan yang maju di abad ke-8 M telah menjadi tempat persinggahan bagi kapal-kapal para pelancong dan pedagang beragama Islam dari daerah Arab maupun Persia. Kedatangan para pedagang Islam Arab dan Persia yang kemudian bermukim di Perlak ini kemudian melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Buah dari perkawinan tersebut melahirkan kerajaan Islam Perlak pertama, yaitu pada hari Selasa tanggal satu bulan Muharram

tahun 225 H atau sekitar tahun 840 M. dan sultan pertama kerajaan ini adalah Syed Maulana Abdul Aziz Shah (peranakan Arab Quraisy dengan Puteri Perlak).

Samudera Pasai

Kerajaan Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan maritime. Dalam kehidupan perekonomiannya, kerajaan seperti ini pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia tidak mempunyai basis agrarian, melainkan perdagangan dan pelayaran. Kerajaan ini merupakan pusat perdagangan yang sangat penting. Adanya mata uang drama (dirham) membuktikan bahwa kerajaan ini pada saat itu merupakan kerajaan yang makmur.

Kerajaan ini terletak di pesisir Timur laut Aceh. Kemunculannya sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 M, sebagai hasil proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8 M, dan seterusnya. Bukti berdirinya kerajaan Samudera Pasai pada abad ke 13 M itu didukung oleh adanya nisan kubur terbuat dari granit asal samudera Pasai. Dari nisan itu, dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadhan tahun 696 H, yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 M. Malik al-Saleh, raja pertama itu, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Hal itu diketahui melalui tradisi Hikayat Raja-raja Pasai, Hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sumber yang dilakukan sarjan-sarjana Barat, khususnya para sarjana Belanda, seperti Snouck Huogranje, J.P.Molquette, J.L.Moens, J. Hushoff Poll, G.P.Rouffaer, H.K.J. Cowan dan lain-lain. Merah Silu (nama awal Malik al-Saleh) diislamkan oleh Syekh Ismail yang datang dari Mekah melalui Malabar (India Selatan). Setelah memeluk agama Islam, Merah Silu berganti nama dengan Sultan Malik al-Saleh dan Samudera Pasai selanjutnya bernama Samudra Dar al-Islam.

Sultan Malik As Shaleh dinobatkan menjadi sultan kerajaan Samudra Pasai juga oleh Syeh Ismail, atas nama Syarif Mekah yang menyingkir dari Baghdad ke Mesir sejak 1258 akibat serang tentara Mongolia. Penobatan ini atas pertimbangan, pertama, dinasti Mamaluk memerlukan orang asli yang kuat dan beragama Islam madzhab Syafi'i, kedua, karena menurut pendapat Syeh Ismail, Merah Silu akan sanggup membasmi aliran syiah yang masih merajalela di pantai timur Sumatra, ketiga, karena dinasti Mamaluk mengharapkan bahwa Merah Silu akan sanggup mengambil alih dagang lada dari tangan para pedagang Persia, Arab dan Gujarat yang beragama Islam aliran Syiah.

Dari segi politik, munculnya kerajaan Samudera Pasai abad ke-13 itu sejalan dengan suramnya peranan maritim kerajaan Sriwijaya, yang sebelumnya memegang peranan penting di kawasan Sumatera dan sekelilingnya. Jadi, kerajaan Samudera Pasai merupakan episode dari kelanjutan kerajaan Sriwijaya. Sebab kemunduran Sriwijaya ternyata dimanfaatkan untuk mendirikan kerajaan Islam di Aceh.

Gelar Malik Ash Shalih sendiri diperoleh karena selama pemerintahannya, keadaan negeri Pasai sangat makmur dan berlimpah kekayaannya, memiliki angkatan laut yang kuat dan angkatan darat yang teratur; Islam aliran ahlussunah wal jamaah dijadikan dasar Negara, sehingga Syeh Ismail al Zarfi memberinya gelar sultan al Malik ash Salih yaitu gelar yang di masa itu digunakan penguasa Mesir "Sultan al Malik Ash Shalih Najmudin Al Ayyubi"

Terlepas dari segala kemungkinan adanya pusat kekuasaan Islam yang lebih tua, dari sudut kepastian, sejarah Pasai adalah kerajaan Islam tertua. Tetapi meskipun Pasai telah berdiri di akhir abad ke-13, kekuasaan yang dominan di perairan Nusantara adalah Majapahit, yang kelahirannya hampir bersamaan dengan Pasai, bahkan kerajaan kembar Samudera Pasai pernah juga ditaklukan oleh Majapahit, setidaknya demikianlah menurut kitab *Nagarakertagama*, tulisan Prapanca, penyair kerajaan Majapahit. Barulah setelah kekuasaan maritim Majapahit merosot, karena perhatian lebih tertuju kepada pergolakan dinasti dan keguncangan keraton pusat menghadapi kekuatan-kekuatan lokal, kekuasaan maritim Islam berkembang pesat sejak akhir abad 14.

Pada tahun 1521 kerajaan ini ditaklukan oleh Portugis yang mendudukinya selama tiga tahun. Setelah itu, pada tahun 1524 dan seterusnya, kerajaan Samudera Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam.

Kerajaan Malaka

Malaka merupakan kerajaan Islam kedua setelah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan kebudayaan Islam di sekitar perairan Nusantara. Kerajaan Malaka terletak di jalur pelayaran dan perdagangan antara Asia Barat dengan Asia Timur. Sebelum menjadi kerajaan yang merdeka, Malaka termasuk wilayah kerajaan Majapahit.

Iskandar Syah, raja pertama Kerajaan ini, awalnya adalah seorang pangeran dari kerajaan Majapahit, bernama asli Parameswara, yang melarikan diri setelah Majapahit kalah dalam perang Paregreg. Ia melarikan diri bersama pengikutnya ke Semenanjung Malaya dan membangun kerajaan baru yang kemudian diberi nama Malaka.

Pada saat Parameswara melarikan diri dan bersembunyi di Malaka, Malaka masih merupakan desa kecil di pantai barat Semenanjung, dan menjadi sarang perampok, bajak laut dan nelayan.

Pada tahun 1403, penguasa Tiongkok, Kaisar Yung-lo dari rajakula Ming mengirimkan utusan-utusan ke Negara Asia Tenggara dan Asia Barat untuk memperbaiki hubungan dagang dan politik luar negeri. Perutusan pertama dipimpin oleh laksamana Ying Ching. Perutusan singgah di Malaka; Parameswara, sebagai orang yang paling berkuasa di Malaka, menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan pengakuan oleh kaisar Tiongkok sebagai penguasa pantai Malaka. Yin Ching, yang memang bertugas untuk mencari hubungan dengan Negara-negara asing, segera menyanggupinya. Akibat dari pengakuan itu, ia akan memperoleh perlindungan dan bantuan dari Tiongkok, jika Malaka pada suatu saat diserang tentara Siam. Untuk memperoleh pengakuan itu, Parameswara mempersembahkan bunga emas sebanyak 40 tahlil (1 tahlil=37, 8 gram) kepada laksamana Yin Ching.

Pada tahun 1405, raja Parameswara mengirim utusan ke istana Peking untuk secara resmi minta pengakuan dari kaisar Yung-Lo. Utusan dikaruniai sebuah cap, pakaian dari kain sutra, dan pajong kuning, suatu bukti bahwa kaisar Yung-Lo memberikan pengakuan secara resmi kepada Negara Malaka, yang dipimpin oleh parameswara.

Berkat persahabatannya dengan Tiongkok, kedudukan raja Parameswara makin hari bertambah kuat. Raja Parameswara mulai menyempurnakan pelabuhan Malaka demi kesejahteraan rakyatnya, yang pembangunannya telah dimulai antara tahun 1405 dan 1409. Pada tahun 1409, Malaka telah menjadi Bandar Raya, karena letak pelabuhan Malaka memang sangat strategis dan sangat baik.

Pada tahun 1414, atas bujukan permaisuri, Parameswara memeluk Islam, dan bernama Megat Iskandar Syah. Peristiwa tersebut membuat banyak rakyat Malaka yang memeluk agama Islam. Dan Malaka pun menjadi Kesultanan Islam, Negara Islam pertama di Malaya. Dalam waktu beberapa tahun saja, pelabuhan Malaka sudah ramai dikunjungi perahu dagang dari tiga jurusan yakni dari utara (Tiongkok), dari barat (India, Persia, Arab) dan dari Timur (Indonesia). Malaka mulai menguasai lalu lintas dagang dan pelayaran di Selat Malaka.

Sebab-sebab keberhasilan Malaka sebagai kerajaan Islam yang terkenal dengan kota pelabuhan yang terbesar dan paling penting di Asia Tenggara dari abad ke-15 hingga ke-16 antara lain:

Undang-undang disusun sebagai bagian dari perlengkapan administrasi dan hukum yang efisien menyediakan hal-hal dasar yang mungkin diperlukan untuk rencana lama atas pedagang asing.

Keadilan raja-raja Malaka ditunjukkan oleh seorang sultan yang lebih senang berada di kota Malaka dibandingkan pergi berburu agar dia dapat mendengar dan mengambil keputusan terhadap penyalahgunaan dan tirani yang Malaka timbulkan karena posisi pentingnya,

Untuk memenuhi kebutuhan fisik dari para pedagang, Malaka diperlengkapi secara mengagumkan dengan membuat gudang barang di bawah tanah, dimana para pedagang dapat menyimpan barang-barang mereka sambil menunggu barang baru yang masuk.

Pada tahun 1424, sultan Megat Iskandar Syah mangkat, dan digantikan putranya Muhammad Syah yang kemudian dikenal dengan sebutan Sri Maharaja. Pemakaian gelar itu didasarkan atas pengakuan bahwa Muhammad Syah ialah keturunan rajakula Sailendra di Sriwijaya, keturunan Balaputradewa. Sri Maharaja ini memimpin Kerajaan Malaka hingga tahun 1444 dan selanjutnya digantikan putranya Sri Parameswara Dewa Syah yang hanya memerintah selama dua tahun karena tidak mampu bertahan menghadapi tantangan Golongan Tamil Islam di bawah pimpinan Tun Ali dan berhasil dibunuh oleh raja Kasim, yang dicalonkan sebagai Sultan Malaka oleh golongan Tamil Islam.

Setelah raja Kasim berhasil menggulingkan pemerintahan Sri Parameswara Dewa Syah, ia dinobatkan sebagai sultan Malaka dengan julukan Muzaffar Syah dan berkuasa hingga tahun 1459. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Pada masa ini muncul orang kuat, ahli siasat dalam penguasaan selat Malaka, yang bernama Tun Perak, yang secara praktis memegang politik pemerintahan hingga pemerintahan Sultan Mansyur Syah (1459-1477) dan Sultan Alaudin Ri'ayat Syah (1447-1488).

Setelah Sultan Mudzafat Syah wafat, ia digantikan oleh putranya Sultan Mansyur Syah. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berhasil menguasai

kerajaan Siam sebagai bagian taktik memperluas wilayah kekuasaan dan mengokohkan kebesarannya di antara kerajaan-kerajaan lain disekitarnya.

Sultan Mansyur Syah tidak menyerang Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam. Hal ini merupakan salah satu kebijakan politik Sultan Mansyur Syah untuk menjalin hubungan baik dengan sesama kerajaan-kerajaan Islam yang ada disekitarnya. Sultan Mansyur Syah berkuasa dari tahun 1458-1477.

Pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Ri'ayat Syah, Malaka mengenal tokoh sejarah Panglima Hang Tuah, yang kemudian mendapat gelar Laksamana. Timbulnya tokoh-tokoh itulah yang memberikan kegemilangan pada masanya.

Penyatuan Malaya dilakukan oleh pengganti Tun Perak, Tun Putih dan Tun Mutahir. Sepeninggal Tun Perak pada tahun 1498, Tun Putih sebagai bendahara berhasil menundukkan Manjong, Beruas dan Kelantan ke bawah kekuasaan Malaka. kemudian sepeninggal Tun Putih, Bendahara Mutahir menundukkan Patani dan Kedah. Pada masa pemerintahan Alaudin Ri'ayat Syah, Malaya dipersatukan di bawah pemerintah Malaka, dan selat Malaka sepenuhnya dikuasai oleh kota pelabuhan Malaka. Negara-negara di pantai timur Sumatra tunduk pada Malaka. Kota pelabuhannya sepi, karena kapal-kapal dagang yang berlayar di selat Malaka semuanya melalui pelabuhan Malaka. Itulah masa keemasan Malaka. Pada hakikatnya Tun Perak lah yang membuat gemilang kesultanan ini.

Sultan Mahmud Syah menggantikan ayahnya, setelah Sultan Alauddin Syah wafat pada tahun 1488 M. Secara politik, kekuasaan Kerajaan Malaka hanya tinggal mencakup wilayah utama Semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri. Dalam kondisi yang semakin lemah, pada tahun 1511 M, armada perang bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso d'Albuquerque akhirnya berhasil menguasai dan menaklukkan Kerajaan Malaka.

Kerajaan Aceh

Kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1514, terletak di ujung utara pulau Sumatra. Daerah kekuasaannya pada awal berdirinya meliputi Aceh Besar dan Daya di utara pulau Sumatra.

Ada beberapa versi tentang asal-usul kesultanan Aceh ini, Menurut Hikayat Aceh, Aceh Darussalam adalah persatuan dua kerajaan yang masing-masing diperintah oleh Sultan Muzaffar Syah (Pidie) dan Raja Inayat Syah (Aceh Besar), dua orang bersaudara. Perang pecah antara keduanya, dan dimenangkan oleh Muzaffar Syah. Dia menyatukan kedua kerajaan itu dengan nama Aceh Darussalam. Ada pula yang menyebutkan kerajaan Darussalam adalah kerajaan Islam di Indra Purba, Lamuri, yang diperintah oleh Sultan Alaudin Johan Syah pada tahun 601-603 H/1205-1207M. ada pendapat yang menyatakan bahwa kesultanan Aceh sebagai kesultanan dibentuk oleh sultan Husain Syah yang memerintah Aceh Darussalam pada tahun 870-885 H/ 1465-1480 M, dan merupakan persatuan kerajaan Perlak, kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Teumiang, kerajaan Pidie (Syahir Poli dan Sama Indra), kerajaan Indra Purba dan kerajaan Indra Jaya.

Menurut Boestan as-salatin, sultan Aceh yang pertama bernama Ali Moeghajat Sjah. Ia naik tahta pada tahun 913 H. dan memerintah sampai tahun 928. Sebelumnya, tidak ada sultan di Aceh. Yang ada hanya kepala (me[^]ran) yang

mempunyai kekuasaan secara lokal. Sultan Ali Moeghajat Sjah adalah sultan yang pertama memeluk agama Islam dan menyebarkannya di Aceh. Ia menaklukkan Pedir, Samudra dan banyak lagi kerajaan kecil lainnya. Setelah ia meninggal tahun 928, anaknya Sultan Salah ad-din memegang tampuk pemerintahan. Sultan ini, karena tidak mampu memegang tampuk pemerintahan, lalu diturunkan oleh adiknya Ala ad-din pada tahun 946 H. Namun ia masih hidup 9 tahun lagi setelah itu

Sementara itu menurut Joao de Barros, penegak dinasti dan kekuasaan Aceh adalah seorang yang bernama Radja Ibrahim. Sebelumnya, pada waktu kedatangan orang-orang Portugis ke kepulauan Nusantara ini, Aceh merupakan negeri jajahan Pedir, dan diperintah oleh ayah Radja Ibrahim, seorang budak Sultan Pedir yang telah dimerdekakan. Radja Ibrahim menggantikan ayahnya sebagai wakil raja di Aceh karena ayahnya yang telah tua itu turun tahta. Dibawah pemerintahan Ibrahim, Aceh memerdekakan diri dari Pedir dan mulai memperluas kekuasaannya. Kira-kira pada tahun 1520, Ibrahim menguasai Daya, kemudian menaklukkan Pedir, yang menyebabkan Sultan lari ke Pasei, dan kemudian Ibrahim menguasai pula kota tersebut (1524); lalu ia mengusir orang-orang Portugis yang berada disana. Sultan Pasei lari ke Malaka dan Sultan Pedir dan Daya lari kedaerah kekuasaan raja Aru.

Anas Mahmud berpendapat bahwa kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 M di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzafar Syah (1485-1497 M). dialah yang membangun kota Aceh Darussalam.

Lepas dari berbagai pendapat yang ada, Sebelum 1500 Aceh merupakan suatu daerah yang tidak berarti. Ali Moeghajat Sjah adalah penguasa pertama Aceh yang membesarkan Kerajaan Aceh. Beliau memperluas daerah kerajaan Aceh. Pada 1520 ia memasukkan Daya ke dalam daerah kekuasaan Aceh, kemudian menaklukkan Pedir dan Pasei (1524) serta memerangi Aroe. Ketika ia meninggal, digantikan oleh anaknya Salah ad-din. Sultan ini, (menurut riwayat dalam negeri) adalah seorang yang lemah, yang tidak sanggup memegang tampuk pemerintahan. Sultan Salahudin bersikap lunak dan memberi peluang kepada misionaris Portugis untuk bekerja di tengah orang-orang Batak di daerah pantai Timur Sumatra. Ia juga dipandang kurang memperhatikan urusan pemerintahan Sehingga pada tahun 1539 beliau sudah tidak menjabat lagi akibat digantikan oleh saudaranya Sultan Alauddin Ri'ayat Syah yang bergelar al Qahhar.

Pada masa pemerintahan Sultan Al Qahhar, dalam menghadapi bala tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki. Sultan Turki memberikan bantuan berupa meriam dan bendera sebagai lambang perlindungan Turki terhadap Aceh dalam kesatuan kekhalfahan Islam. Selain itu Aceh juga menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara. Dari beberapa kerajaan Islam di Nusantra, hanya Aceh yang diakui oleh dunia Islam, dan nampaknya Aceh mengakui Kerajaan Turki Usmani sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kekhalfahan dalam Islam.

Sependinggal Sultan Al Qahhar, yang meninggal pada 28 September 1571, kesultanan Aceh dilanda kemelut berlarut-larut akibat perebutan takhta kekuasaan. Pernah dalam tiga bulan terjadi pelantikan dan pemakzulan tiga sultan. bahkan sultan terakhir dalam kemelut itu, yaitu Sultan Zainul Abidin, mati terbunuh pada tanggal 5 Oktober 1579.

Kesultanan Aceh menjadi stabil kembali setelah Sultan Alaudin Ri'ayat Syah Sayid al Mukammal, yang memerintah pada tahun 1589 hingga 1604. Setelah itu kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Ri'ayat Syah (April 1604 – April 1607) kemudian oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kesultanan Aceh mengalami masa keemasan, yang menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur Sumatra sampai Asahan dan Pantai barat Sumatra. Ia juga memperhatikan perkembangan agama Islam dengan mendirikan masjid-masjid, seperti masjid Baitur Rahman, dan pusat-pusat pendidikan Islam atau dayah. Pada masanya juga disusun sistem perundang-undangan yang disebut adat mahkota alam. Diceritakan pula Beliau menerapkan hukum Islam dengan tegas. Pada masa ini pula dikenal para ilmuwan Syamsudin As Sumatrani dan Hamzah Fansuri.

Dalam menjalankan politik luar negeri, Sultan Iskandar Muda menjalankan 5 pasal program yang dipandanginya tepat untuk menjaga kedaulatan luar negeri Aceh Darussalam, antara lain yaitu:

Menguasai seluruh negeri dan pelabuhan sebelah selat Malaka dan mengusahakan terjaminnya wibawa atas negeri-negeri itu sehingga menghindarkan Aceh dari jerat-jerat "Devide et impera" negara asing. Usaha ini dijalankan secara mufakat dan berkesinambungan.

Memukul Johor, supaya tidak lagi ditukangi oleh Portugis dan Belanda.

Mengadakan serbuan ke negeri-negeri di sebelah timur Melayu, sejauh yang merugikan perdagangan Aceh dan usahanya untuk mencapai kemenangan dari musuh, seperti Pahang, Patani, dan lain-lain,

Mengalahkan Portugis dan merebut Malaka.

Mendongkrak harga pasaran hasil bumi untuk ekspor, dengan jalan mengkonsolidasikan pelabuhan Samudera ke satu pelabuhan Aceh, atau sedikitnya mengadakan pengawasan yang kontinyu sehingga kepentingan kerajaan tidak dirugikan.

Sepeninggal Sultan Iskandar Muda pada 27 Desember 1636, atas wasiyat beliau, kesultanan Aceh dipimpin oleh menantu Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani Ala ad-din Moeghajat Sjah, yang memerintah hingga tahun 1641. Pada masa inilah ada seorang ulama dari Gujarat yaitu Syeh Nurudin Ar Raniri yang menulis kitab as-sirat al mustaqim tentang ibadah dalam Islam dan atas permintaan sultan ia menulis kitab Bustanas Salatin.

Ia mangkat tanpa meninggalkan anak pada tanggal 15 Pebruari 1641 Kemangkatan sultan membawa suatu huru hara yang besar. Akhirnya tiga hari setelah meninggalnya Iskandar Thani orang-orang sepakat untuk mengangkat jandanya Poetri Sri Alam Permaisoeri, anak dari Iskandar Moeda, menjadi ratu. Ia memakai gelar Tadj al Alam Safiatuddin Sjah

Di bawah pemerintahan Tadj al-alam, kegemilangan Aceh di bidang politik, ekonomi dan militer mulai menurun, karena ketidaksenangan sebagian orang kepada pemimpin wanita dan karena meningkatnya kekuasaan para ulubalang, daerah kekuasaan Aceh terbatas lagi sampai bagian utara pulau Sumatera. Pendudukan di luar Sumatera seperti Pahang dan juga di pulau Sumatera sendiri harus dilepaskan secara berturut-turut. Urusan yang memerlukan wali hakim atau

imam salat sepenuhnya diserahkan kepada kali malikon ade (Qadi Malik al Adil) atau hakin agung Sultan.

Sultanah berikutnya adalah Sri Ratu Naqiyatuddin Nurul Alam, kemudian Inayat Syah, dan terakhir Kamalat Syah. Pemerintahan sultanah akhirnya tidak diteruskan karena adanya fatwa dari Mekah bahwa Syari'ah melarang wanita untuk memerintah (1699).

Sependinggal keempat sultanah, kesultanan Aceh mengalami serangkaian perebutan takhta, hingga pada tahun 1873, kesultanan Aceh dituduh Belanda melindungi bajak laut dan perdagangan budak, dan mengancam keselamatan pedagang-pedagang dari luar yang ingin membeli lada di Aceh dan juga armada Aceh sering menyerang negeri-negeri tetangga. Sehingga Belanda menyerbu ibu kota kesultanan dan pada bulan Januari 1874, istana kesultanan dapat direbut Belanda. Tetapi sultan Aceh, Sultan Mahmud Syah, dapat meloloskan diri bersama panglima Polem.

Pada tahun 1874 itu Belanda menyatakan Aceh dan daerah taklukannya menjadi milik pemerintahan Hindia Belanda. Sekalipun Kesultanan Aceh dihapuskan Belanda, rakyat Aceh setelah itu masih memiliki seorang sultan yaitu Sultan Muhammad Daud Syah, yang dinobatkan di Masjid Indrapuri pada tahun 1878. Ia tertangkap pada tahun 1903, kemudian dibuang ke Ambon pada tahun 1907, dan wafat pada tahun 1939.

Kerajaan Islam di Riau

Kerajaan-kerajaan Islam yang disebut-sebut dalam berita Tome Pires (1512-1515) ialah Siak, Kampar, Inderagiri kini berada di daerah Riau. Pada abad ke-13 dan ke-14 kerajaan-kerajaan tersebut masih dalam kekuasaan kerajaan Melayu dan Singasari-Majapahit dan tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15 M. Pengaruh bercorak Islam itu akibat perkembangan kerajaan Islam Samudera Pasai dan Malaka. Masih berdasarkan berita Tome Pires ketiga kerajaan tersebut senantiasa melakukan perdagangan dengan Malaka bahkan membayar upeti kepada kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan di pesisir Sumatra Timur ini dikuasai kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah (wafat 1477). Ketika Belanda menguasai Malaka tahun 1641, sejak abad ke-17 sampai abad ke-18, praktis kerajaan tersebut berada di bawah pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi perdagangan VOC, serta terikat perjanjian yang menguntungkan Belanda.

Kerajaan Jambi

Letak geografis Jambi dengan DAS Batanghari dengan sungai-sungailainnya memberikan kemudahan untuk kegiatan perdagangan baik lokal, regional, maupun internasional. Hubungan pelayaran dan perdagangannya dengan tempat-tempat di pesisir timur yaitu di Selat Malaka ditandai munculnya kontak dengan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional yang sudah ada sejak abad-abad pertama Masehi. Dengan adanya kedatangan pedagang muslim dalam pelayaran dan perdagangan internasional sejak abad ke-7 dan ke-8 M, kemungkinan mereka sudah

dapat berhubungan satu dengan lainnya. Meskipun demikian, berita Cina, kitab pei-hu-lu tahun 875 M menyebutkan nama Chan-Pei yang didatangi oleh para pedagang Po'sse (Orang-orang Persi) untuk mengumpulkan barang dagangan berupa buah-buah pinang (areca nuts), yang dalam bahasa Sunda disebut Jambe (mungkin sekali jadi menjadi sebutan Jambi). Oleh karena pedagang Po'sse adalah pedagang Persi yang tentunya sudah Islam sehingga mungkin pedagang muslim dari Persi atau Iran sudah sampai ke Jambi.

Jika sejak saat itu sudah ada Islamisasi, mungkin masih terbatas perseorangan. Karena islamisasi besar-besaran bersamaan dengantumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam Jambi sekitar 1500 M dibawah pemerintahan Orang Kayo Hitam yang juga meluaskan Bangsa XII dan Bangsa IX anak Datuk Paduka Berhala. Konon, menurut Undang-undang Jambi Datuk Paduka Berhala adalah seorang dari Turki yang terdampar di Pulau Berhala yang kemudian namanya disebut juga Ahmad Salimyang menikah dengan Putri Salaro Pinang Masak yang sudah muslim, turunan raja-raja Pagarruyung yang kemudian melahirkan Orang Kayo Hitam, Sultan Kerajaan Jambi yang terkenal. Karena itu, kemungkinan besar penyebaran Islam sudah sejak orang tuanya sekitar tahun 1460 M atau pertengahan abad ke-15 M.

Kerajaan Islam di Sumatera Selatan

Berita dari I-Thing seorang musafir dan agama Budhis China dalam perjalanannya ke India menceritakan tentang kehadiran kapal-kapal para pedagang muslim dari Arab (Ta-Shih dan Persi) di pelabuhan Bhoga (Palembang), telah berperan aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan bahkan runtuh pada sekitar abad ke-14 M mulailah Islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 M muncul komunitas muslim di Palembang.

Dengan keterlibatan kebesaran kerajaan Sriwijaya dan selanjutnya kerajaan Malaka, Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan enclave Islam terpenting atau bahkan pusat Islam di bagian selatan Pulau Emas. Meskipun sekitar awal abad 16 M, masih di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Demak masa pemerintahan Pate Rodim.

Nama tokoh yang tercatat menjadi sultan pertama adalah Sultan Abdurrahman Khalifat al-Mukminin Sayidil Iman/Pangeran Kusumo Abdurrahim/kyai Mas Endi. Sejak tahun 1659 sampai 1706. Palembang berturut-turut diperintah oleh 11 sultan sejak tahun 1706 dan sultan yang terakhir, Pangerang Kromojoyo/Raden Abdul Azim Purbolinggo (1823-1825). Dalam Sejarah Banten, pada tahun 1596 Palembang pernah diserang kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Muhammad yang gugur (pangerang Seda ing Palembang atau Pangerang Seta ing Rana). Penyerangan oleh Banten ke Palembang bukan masalah agama melainkan ekonomi untuk menambah penghasilan ekspor dari Kesultanan Banten.

Kerajaan Islam di Sumatra barat

Sejak abad ke-15 dan ke-16 hubungan antara daerah Sumatera Barat melalui pelabuhan-pelabuhannya dengan berbagai negeri jelas dalam hubungan perdagangan antara lain dengan Aceh. Pada masa Iskandar Muda, Pariaman merupakan salah satu

daerah yang berada di bawah kerajaan Aceh dan demikian pula sejak penggantinya. Pada abad ke-17M ada ulama terkenal di Sumatera barat yang merupakan salah seorang murid Abdul rauf Al-Sinkili yang bernama Syekh Burhan Al-Din (1646-1692) di Ulakan. Ia mendirikan surau, dan tidak salah lagi Ulakan merupakan pusat keilmuan Islam Minangkabau. Tarikat Syatariyah yang diajarkannya tersebar di daerah Minangkabau dan ajaran tasawufnya cenderung kepada syariat dan dapat dikatakan sebagai ajaran neosufisme. Syekh Burhan Al-Din dalam masyarakat setempat dikenal sebagai Tuanku Ulakan. Penyebaran Islam yang sifatnya pembaruan dan berjangkauan lebih jauh lagi yang mencapai klimaksnya pada awal abad ke-19.

Sejak awal abad ke-16 sampai awal abad ke-19 itu di daerah Minangkabau senantiasa terdapat kedamaian sama-sama saling menghargai antara kaum Adat dan Kaum Agama antara hukum adat dan syariat Islam sebagaimana terdapat dalam pepatah, "Adat bersandi Syara', Syara' bersandi Adat." Sejak awal abad ke-19 timbul pembaruan Islam di daerah Sumatera Barat pengaruh Wahabiah di mana terjadi "Perang Padri", yakni perang antara golongan Adat dan Golongan Agama. Wilayah Minangkabau mempunyai seseorang raja yang berkedudukan di Pagarruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang negara, tetapi tidak mempunyai kekuasaan karena hakikatnya kekuasaan ada di tangan para Penghulu yang tergabung dalam Dewan Penghulu atau Dewan Nagari. Pada awal abad ke-19 Belanda dengan celah pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama dalam perang padri, memakai kesempatan demi keuntungan politik dan ekonominya. Perang padri yang cukup lama itu dibagi atas tiga masa, yaitu masa pertama berlangsung antara 1821-1825, ditandai dengan meluasnya perlawanan Padri dengan seluruh rakyatnya ke seluruh daerah Minangkabau.. masa kedua antara tahun 1825-1830, ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian-perjanjian dengan gerakan Padri mulai melemah. Masa ketiga antara tahun 1830-1838, ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran, dan diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin padri terutama Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran Benteng Bonjol tanggal 25 Oktober 1837.

Hubungan Politik dan Keagamaan antar Kerajaan

Hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertamanya memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu mulanya, mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Adalah dalam rangka penyebaran Islam itu pula, Fadhilah Khan dari pasai datang ke Demak, untuk memperluas wilayah kekuasaan ke sunda Kelapa.

Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Contohnya adalah persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan Kompeni Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan.

Meskipun demikian, kalau kepentingan politik dan ekonomi antar kerajaan-kerajaan Islam sendiri terancam, persamaan agama tidak menjamin bahwa permusuhan tidak ada. Peperangan di kalangan kerajaan-kerajaan Islam sendiri sering terjadi. Misalnya, antara Pajang dan Demak, Ternate dan Tidore, Gowa-Tallo

dan Bone. Oleh karena kepentingan yang berbeda di antara kerajaan-kerajaan itu pula, sering satu kerajaan Islam meminta bantuan kepada pihak lain, terutama kompeni Belanda, untuk mengalahkan Islam yang lain.

Hubungan antar kerajaan-kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Samudera Pasai dan kemudian Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekah menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Dari sini ajaran-ajaran Islam tersebar ke pelosok Nusantara melalui karya-karya Ulama dan murid-muridnya yang menuntut ilmu kesana.

Polarisasi Budaya dalam Proses Pembentukan Negara

Dalam rentang waktu sejak abad akhir abad ke-13, ketika samudera pasai berdiri, sampai abad ke-17, di saat istana Gowa –Tallo resmi menganut Islam, menurut Taufik Abdullah, setidaknya tiga pola pembentukan budaya, yang memperlihatkan bentuknya dalam proses pembentukan negara Islam. ketiga pola itu adalah: pola samudera pasai, pola sulawesi selatan, dan pola Jawa.

Dalam Pola Samudera Pasai dijelaskan bahwa Lahirnya kerajaan Samudera pasai berlangsung melalui perubahan dari negara yang segmenter ke negara yang terpusat. sejak awal perkembangannya, Samudera pasai menunjukkan banyak pertanda dari pembentukan suatu negara baru. Kerajaan ini tidak saja berhadapan dengan golongan-golongan yang belum ditundukkan dan di-Islam-kan dari wilayah pedalaman, tetapi juga harus menyelesaikan pertentangan politik serta pertentangan keluarga yang berkepanjangan. Dalam proses perkembangannya menjadi negara terpusat. Samudera Pasai juga menjadi pusat pengajaran agama, reputasinya sebagai pusat pengajaran agama terus berkelanjutan walaupun kemudian kedudukan ekonomi dan politiknya menyusut.

Dengan pola tersebut, Samudera Pasai memiliki Kebebasan Budaya untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan, yang mencerminkan gambaran tentang dirinya. Pola yang sama dapat pula disaksikan pada proses terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam.

Menurut Taufik Abdullah, sebagaimana yang dikutip oleh Isom Yusqi, pola pertama dan kedua, yaitu pola Samudera Pasai dan pola Sulawesi selatan menunjukkan cara yang berbeda, suatu kecenderungan ke arah pembentukan tradisional yang bercorak integratif. Inilah tradisi, di mana Islam mengalami proses pemribumian secara konseptual dan struktural. Islam menjadi dipandang sebagai landasan masyarakat budaya dan kehidupan pribadi. Dalam komunitas kognitif yang baru maupun dalam paradigma politik, yang dipakai sebagai pengukuran apa yang bisa dianggap wajar dan bukan.

Di kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, di samping membangun Mesjid Baitur Rahman dan beberapa Masjid di daerah lain, juga memerintahkan rakyat sembahyang lima waktu, puasa Ramadhan, dan puasa sunnah, serta menjauhkan diri dari minuman arak dan bermain judi. Aceh di zaman Iskandar Muda mengkonsolidasikan dirinya sebagai serambi Mekka. Pada masa itu pula, dirumuskannya hukum dan adat adalah ibarat kuku dan daging. Ulama dalam sejarah Aceh menjadi perumus realitas dan pengesahan kekuasaan.

Kemunculan dan perkembangan Islam di kawasan Nusantara menimbulkan transformasi kebudayaan (peradaban) lokal. Transformasi melalui pergantian agama dimungkinkan karena Islam selain menekankan keimanan yang benar, juga mementingkan tingkah laku dan pengalaman yang baik, yang diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Terjadinya transformasi kebudayaan (peradaban) dari sistem keagamaan lokal kepada sistem keagamaan Islam biasa disebut revolusi agama. Transformasi masyarakat Melayu kepada Islam berbarengan dengan masa perdagangan, kekayaan dan kekuasaan. Masa ini mengantarkan wilayah Nusantara ke dalam internasionalisasi perdagangan dan kosmopolitanisme kebudayaan yang tidak pernah dialami masyarakat kawasan ini pada masa-masa sebelumnya.

KESIMPULAN

Terbentuk komunitas-komunitas Islam khususnya di daerah pesisir, Dalam Sejarah Umat Islam Indonesia, Taufik Abdullah dkk. menjelaskan bahwa Sekitar Abad ke 1-5 H atau ke 7-13 M dorongan pengambil alihan kekuasaan politik Islam di Nusantara dimulai dari para pedagang dan mubalig Islam yang memperkenalkan Islam melalui pembentukan komunitas-komunitas Islam di tengah hegemoni maritim Sriwijaya serta dalam situasi kultural masyarakat Hindu-Budha, Dengan berdirinya pusat-pusat kekuasaan Islam seperti Aceh di Sumatera; Demak, Pajang, dan Mataram di Jawa; Gowa-Tallo dan Bone di Sulawesi; Ternatae dan Tidore di Maluku, dan sebagainya, maka penyebaran Islam memang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan politik, struktur politik dan tradisi politik masing-masing pusat kekuasaan atau kerajaan itu. Kepentingan politik atau ekonomi, di samping panggilan suci agama, telah tampil sebagai faktor-faktor yang ikut menentukan corak dan penyebaran, pengembangan agama Islam serta bentukan masyarakat Islam di wilayah masing-masing, Dalam bidang politik, agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Contohnya adalah persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan Kompeni Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, (Jakarta: Pustaka Iman, 2012) hal 61
Amani Lubis, dkk., Sejarah Peradaban Isla, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UINSyarif Hidayatullah, 2005)
Anas Mahmud., Naik Turunnya Peranan Kerajaan Aceh Darussalam di Pesisir Pulau Sumatra, dalam A. Hasymi, (ed), Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh, (Jakarta: PT Al Ma'arif, 1989)
Azyumardi Azra, jaringan Ulama..., (Bandung:Mizan, 1944),
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru VanHoeve, 1994)

- Hoesein Djayadiningrat, Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten, (Jakarta: Djambatan, 1983),
- Ishom Yusqi, dkk Ulinnuha husnan (ed), Mengenal Konsep Islam Nusantara, (Jakarta: Pustaka STAINU, 2015)
- KBBI Online oleh Ebta Setiawan <http://kbb.web.id/karateritik>. Pukul 18.45 senin, 17 Oktober 2016
- M. Dien Madjid, Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi dan Perjuangan Rakyat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014)
- Marden, Hist, of Sumatera ed3 hal417-23; Veth, Atchin etc. hal61-63; Tiele, De Euro peer s in de Mai Arch.dalamBijdr.Kon.Inst. 4,1 hal 385-86; F. Ch.Danvers, ThePortugueseinIndiavoll hal356-57
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,(Jakarta: PT Gramdeia Pustaka Utama, 2008),
- Raden Hoesein Djajadiningrat, Kesultanan Aceh (Suatau Pembahasan tentang Sejarah Kseultanan Aceh Berdasarkan bahan-banh yangterdapat dalam KARYa Melaya) alih bahasa Teuku Hamid, Hal. 12 Dikutip dari Bloemlezing karya Niemann bag. 2 cet. ke-3
- Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu- Jawa dan timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2009)
- SNI III
- K H. Muhammad Syamsu,Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan sekitarnya, (Jakarta:Lentera, 1999),
- Taufik Abdullah dan M. Hisyam (ed), Sejarah Umat Islam, (Jakarta:Yayasan Pustaka Umat, 2003)
- Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed), Tradisi dan Kebangkitan Islamdi Asia tenggara, (Jakarta: LP3ES, 1989) h. 58, baca juga Ishom dkk,Konsep Islam Nusantara, h. 49
- Tim Penulis MUI, ed. Taufik Abdullah dan M. Hisyam, Sejarah Umat Islam, (Jakarta:Yayasan Pustaka Umat, 2003)
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011)
- Uka tjandrasasmita (ed). Sejarah nasional Indonesia III, (Jakarta:PN Balai Pustaka, 1948),
- Uka Tjandrasamita, Arkeologi Islam Nusantara,(Jakarta: Gramedia, 2009)
- Wan Husein Azmi, Islam di Aceh Masuk dan Berkembannya Hingga Abad XVI, dalam A. Hasmy (ed) Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (PT Al-Maarif, 1989)